

RENCANA AKSI & REALISASI KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Target / Realisasi				Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator / Output	Target / Realisasi			
					TW I	TW II	TW III	TW IV			TW I	TW II	TW III	TW IV
I	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Skor IKM	86	Nilai					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat SAKIP				
		Predikat AKIP	BB	Predikat					- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
									- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	T: 3 R: 3		T: 3 R: 3	
									- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	T: 4 R: 4		T: 1 R: 1	
									- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Periode Administrasi Perangkat Daerah				
									- Penyediaan Gaji dan Tunjangan Orang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Orang				
									- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Orang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Orang	T: 1 R: 1	T: 1 R: 1	T: 1 R: 1	
									- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		T: 1 R: 1		
									- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi Barang Milik Daerah				
									- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	T: 1 R: 1	T: 1 R: 1	T: 1 R: 1	
									- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sipil daerah				
									- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			T: 30 R: 20	
									- Administrasi Umum Perangkat Daerah					
									- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			T: 1 R: 1	
									- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	T: 1 R: 1		T: 1 R: 1	
									- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			T: 1 R: 1	

									-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	T: 1 R: 1	T: 1 R: 1	T: 1 R: 1	
									-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	T: 3 R: 3	T: 3 R: 3	T: 3 R: 3	
									-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	T: 3 R: 3	T: 3 R: 3	T: 3 R: 3	
									-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
									-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			T: 50 R: 30	
									-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian jasa penunjang urusan perangkat daerah				
									-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	T: 3 R: 3	T: 3 R: 3	T: 3 R: 3	
									-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	T: 3 R: 3	T: 3 R: 3	T: 3 R: 3	
									-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	T: 1 R: 1	T: 1 R: 1	T: 1 R: 1	
									-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah				
									-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			T: 150 R: 100	
									-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			T: 200 R: 125	
									-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			T: 25 R: 20	
II	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	OPINI BPK	WTP	OPINI						PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	OPINI BPK				
									-	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD yang disusun tepat waktu				
									-	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun			T: 2 R: 1	
									-	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			T: 2 R: 1	

									-	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD Kab/Kota yang disusun tepat waktu				
									-	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota			T: 22 R: 11	
									-	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			T: 22 R: 11	
									-	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota			T: 36 R: 36	
									-	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penyelesaian administrasi Perbendaharaan Daerah				
									-	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	T: 3 R: 3	T: 3 R: 3	T: 3 R: 2	
									-	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	T: 3 R: 3	T: 3 R: 3	T: 3 R: 2	
									-	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	T: 3 R: 3	T: 3 R: 3	T: 3 R: 2	
									-	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	T: 3 R: 3	T: 3 R: 1	T: 3 R: 0	
									-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase penyelesaian administrasi Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				

									-	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	T: 3 R: 3	T: 3 R: 3	T: 3 R: 2	
									-	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi		T: 2 R: 1		
									-	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		T: 1 R: 1		
									-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah			T: 10 R: 5	
									-	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			T: 1 R: 0	
									-	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyelesaian Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				
									-	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	T: 3 R: 0	T: 3 R: 0	T: 3 R: 0	
									-	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	T: 1 R: 1	T: 1 R: 1	T: 1 R: 0	
									-	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	T: 1 R: 1	T: 1 R: 1	T: 1 R: 1	

									-	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				
										Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi			T: 172 R: 120	
III	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengamanan Barang Milik daerah	84,62%	Persentase						PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah				
									-	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah				
									-	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	T: 1 R: 1		T: 1 R: 0	
									-	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	T: 3 R: 3	T: 3 R: 3	T: 3 R: 2	
									-	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	T: 1 R: 1	T: 1 R: 1	T: 1 R: 0	
									-	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	T: 1 R: 1	T: 1 R: 1	T: 1 R: 0	
									-	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	T: 3 R: 3	T: 3 R: 3	T: 3 R: 0	
									-	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	T: 3 R: 3	T: 3 R: 3	T: 3 R: 2	

IV	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	5,70%	Persentase						PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah				
									-	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah				
									-	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	T: 1 R: 1	T: 1 R: 1	T: 1 R: 0	
									-	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	T: 3 R: 3	T: 3 R: 3	T: 3 R: 0	
									-	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			T: 49 R: 30	
									-	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	T: 3 R: 3	T: 3 R: 3	T: 3 R: 2	
									-	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	T: 3 R: 3	T: 3 R: 3	T: 3 R: 2	
									-	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan			T: 1 R: 0	
									Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		T: 1 R: 1	T: 1 R: 1	T: 1 R: 0		
									-	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	T: 3 R: 3	T: 3 R: 3	T: 3 R: 2	
										Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah - UPTD PPD Kota Jambi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			T: 7 R: 7	
										Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah - UPTD PPP Kabupaten Muaro Jambi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			T: 10 R: 10	
										Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah - UPTD PPP Kabupaten Batanghari	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			T: 3 R: 3	
										Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah - UPTD PPP Kabupaten Tanjab Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			T: 4 R: 4	
										Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah - UPTD PPP Kabupaten Tanjab Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			T: 4 R: 4	

										Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah - UPTD PPP Kabupaten Tebo	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			T: 4 R: 4	
										Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah - UPTD PPP Kabupaten Bungo	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			T: 4 R: 4	
										Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah - UPTD PPP Kabupaten Sarolangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			T: 4 R: 4	
										Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah - UPTD PPP Kabupaten Merangin	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			T: 4 R: 4	
										Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah - UPTD PPP Kabupaten Kerinci	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			T: 4 R: 4	

Jambi, Januari 2024
KEPALA BADAN,

AGUS PIRNGADI, S,Sos
Pembina Utama Madya
NIP. 19691215 199003 1 005